

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Untuk melihat keterbaharuan penelitian maka penulis mengajukan penelitian terdahulu Dari tulisan berjudul “Efektivitas Sanksi PBB Terhadap Korea” Utara Oleh Rizki Roza dalam penelitian tersebut dikatakan bahwasanya Korea Utara menyatakan telah berhasil membuat bom hidrogen yang dapat dimasukkan ke dalam rudal balistik antar benua (intercontinental ballistic missile/ICBM).

Bom tersebut menjadi senjata nuklir terkuat yang pernah diciptakan. Uji coba kali ini menghasilkan daya ledak setara 100 kiloton TNT, lima kali lipat kekuatan bom atom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Uji coba ini merupakan yang keenam sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2006 dan menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Uji coba tersebut memicu kecaman dan kemarahan masyarakat internasional. Untuk merespons tindakan Korea Utara tersebut, dengan dorongan Amerika Serikat (AS), pada 11 September Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat menyepakati sebuah resolusi yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara. Ini merupakan paket sanksi ke sembilan yang telah dijatuhkan DK PBB terhadap Korea Utara sejak tahun 2006 terkait program senjata nuklir dan rudal Korea Utara (Rizki Roza 2017).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rizki Roza maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis dimana pada penelitian “Efektivitas Sanksi PBB

Terhadap Korea” oleh Rizki Roza Tulisan ini berupaya memberikan gambaran bagaimana efektivitas sanksi baru tersebut dan mengkaji peran apa yang bisa dijalankan Indonesia saat ini untuk membantu penyelesaian krisis Semenanjung Korea. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan dengan judul dampak Sanksi Embargo Amerika Serikat Terhadap Perekonomian Di Korea Utara berupaya memberikan gambaran spesifik pada pembahasan perekonomian di Korea Utara ditetapkannya sanksi Embargo yang didorong oleh Amerika Serikat rentang waktu 2017-2020.

Selain itu, berdasarkan pada jurnal yang ditulis oleh I Wayan Nugraha Adi Sanjaya yang berjudul “Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Senjata Nuklir Oleh Korea Utara”. Tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui setiap resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam setiap sanksi-sanksi yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dari resolusi tersebut penulis memperoleh suatu informasi yang diperlukan untuk implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2270 tahun 2016 tentang Uji Coba Senjata Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Dimana penulis menuliskan sanksi yang terdapat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu merupakan sanksi yang terdiri dari Sanksi Ekonomi, Sanksi Diplomatik dan Sanksi Militer. Dari ketiga sanksi tersebut sanksi ekonomi dan sanksi diplomatik yang diberlakukan dalam Resolusi Nomor 2270 tahun 2016 untuk Korea Utara. Kedua bentuk sanksi ini merujuk pada Pasal 41 Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dapat dikenakan sejumlah sanksi yaitu sanksi ekonomi dan diplomatic(SANJAYA n.d.)

Lalu, berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Geno Vybra Yoga, Bima Jon Nanda, Sofia Trisni Mahasiswa dari Universitas Andalas yang berjudul “Respon

Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump Terhadap Program Nuklir Korea Utara”. Dimana para peneliti ini menjelaskan pengaplikasian strategi deterrence Amerika Serikat dalam merespon pengembangan program nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan presiden Donald Trump tahun 2017-2019. Amerika Serikat selaku negara super power dan negara hegemoni dunia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di dunia. Tujuan Amerika Serikat melakukan strategi deterrence terhadap Korea Utara adalah untuk merealisasikan denuklirisasi Korea Utara dan juga sebagai bentuk upaya Amerika Serikat dalam menjaga hegemoninya di kawasan Asia Pasifik

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah proses penelitian, Tentu diperlukan adanya landasan berpijak demi memperkuat analisa. Maka dari itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan teori ataupun kerangka konseptual yang relevan. Adapun Penulis memiliki konsep dasar bagaimana menganalisis dampak embargo Amerika Serikat terhadap Korea Utara guna mengetahui kondisi perekonomian di Korea Utara.

2.2.1 Ekopolin

Studi ekonomi politik sekarang sangat populer antara sejarawan, ekonom, dan ilmuwan sosial. Minat ini mencerminkan apresiasi yang tumbuh bahwa dunia politik dan ekonomi, pernah dianggap terpisah (setidaknya sebagai bidang akademik penyelidikan), sebenarnya penting mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ekonomi jauh lebih bergantung atas perkembangan sosial dan politik daripada ekonom pada umumnya telah mengakui. Pengakuan atas keterkaitan

antara keduanya bidang telah menyebabkan peningkatan perhatian dari sejarawan dan ilmuwan sosial.

Dalam Hubungan Internasional, Ekonomi dan Politik menjadi dua bahasan yang penting, dimana dari keduanya mampu mempengaruhi satu sama lain seperti pemerintah bergantung pada tumbuh kembang ekonomi dan berkembangnya ekonomi tergantung pada sosial dan politik. Ekonomi Politik Internasional menurut Robert Gilpin yaitu suatu hubungan paralel dan saling interaksi antara negara dan pasar di dunia modern yang menimbulkan ekonomi politik internasional (Gilpin 2017).

Berdasarkan definisi ekonomi politik internasional dari Robert Gilpin, maka penulis menyimpulkan tentang ekonomi politik internasional adalah suatu hubungan antara ekonomi dan politik yang tidak dapat dibahas secara terpisah, dimana dalam ekonomi politik internasional itu terdapat isu-isu seperti adanya perdagangan internasional, keuangan internasional, pembangunan dan adanya regulasi politik dari pemerintah. Dalam perdagangan internasional sendiri membahas tentang adanya ekspor dan impor barang atau jasa.

Ekonomi politik internasional merupakan interaksi timbal balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Pandangan ini membawa implikasi bahwa teori ekonomi politik internasional bukanlah teori ekonomi murni, dalam artian membahas isu-isu ekonomi melalui secara teknis dan juga bukan teori politik murni, yang melihat dimensi ekonomi melalui bersifat politis. Namun lebih dari itu, teori ekonomi politik internasional berfungsi untuk menjelaskan berbagai kait mengait antara faktor-faktor ekonomi dan politik, pasar dan negara, dalam *setting* internasional apalagi setelah Perang Dunia II di mana muncul persaingan antara blok Barat yang liberalis-kapitalis dan

Timur yang sosialis-komunis, yang bukan hanya berbentuk persaingan ideologi politik secara tajam, tetapi juga haluan ekonomi.

Kendati masalah-masalah yang muncul untuk sebagian adalah masalah ekonomi, namun hakikatnya mempengaruhi sistem politik internasional. Karena itu, kemudian muncul pelembagaan sistem ekonomi internasional penunjang untuk mengatur tatanan ekonomi internasional dalam bentuk munculnya organisasi-organisasi kerjasama internasional seperti: PBB, ASEAN, APEC, IMF, Bank Dunia, OPEC, GATT, IBRD, ADB dan lain-lain (Maiwan 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, ekonomi politik internasional diartikan sebagai interaksi antara pasar (sebagai elemen ekonomi) dan politik dalam cakupan internasional, yang kemudian mengimplikasikan adanya hubungan antarnegara dan aktor non-negara di dalamnya. Ekonomi politik internasional memiliki *state of art* atau karakter khas yang tidak dimiliki oleh studi lainnya. *State of art* ekonomi politik internasional adalah interaksi antara negara dan pasar. Hal ini yang kemudian membedakannya dari studi atau disiplin lainnya. Ekonomi politik internasional dan ekonomi politik pada dasarnya hampir sama. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan utama keduanya adalah jika pada ekonomi politik internasional, ada proses dan dampak yang akan berhubungan atau berkaitan dengan negara-negara lain baik yang menjadi saingannya atau yang menjadi aliannya (Alfionita Rizky Perdana 2013).

2.2.2 Embargo Ekonomi

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Embargo memiliki makna harfiah berupa penyitaan sementara terhadap kapal asing, misalnya pada waktu perang, dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan. Kemudian Makna lainnya, embargo adalah larangan lalu lintas barang (antar

negara). Istilah ini juga dapat dipahami sebagai larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun penggunaan istilah embargo paling jamak digunakan untuk definisi dalam KBBI, yakni penghentian hubungan niaga atau lalu lintas barang antar negara. Langkah ini menjadi suatu alat yang ampuh untuk memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara lantaran perdagangan masih menjadi aktivitas utama antar negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Seperti yang diketahui bahwasanya Sanksi ekonomi tampaknya menjadi alat hubungan internasional yang umum. Dimana memang, negara atau lebih umum komunitas internasional menggunakan sanksi ekonomi untuk menghukum dan mencoba mengubah perilaku kebijakan negara target yang dianggap tidak pantas atau menyalahi aturan.

Dalam literatur, para sarjana membedakan dua jenis sanksi yang digunakan dalam hubungan internasional: sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa imbalan aktual atau yang dijanjikan (bantuan kemanusiaan, pengurangan tarif atau penghapusan tarif, dan sebagainya) sedangkan sanksi negatif adalah penggunaan atau ancaman penggunaan hukuman. Seperti yang diperhatikan Baldwin dalam bukunya *Economic Statecraft*, kedua jenis sanksi tersebut merupakan sarana untuk menjalankan kekuasaan dan khususnya untuk mendorong kerja sama antar negara (Baldwin, 1985, p.20) dalam jurnal (Golliard 2013).

Dalam kaitan dengan polugri, dengan melihat asumsi di atas harus dipahami bahwa negara sebagai aktor utama harus menghadapi negara lain seperti bola biliar yang sedang dimainkan di atas mejanya bergerak dan bertubrukan satu sama lain. Yang membuat konsep bola biliar ini menarik adalah adanya perasaan ketidakamanan bersama antar negara dan ketiadaan otoritas kekuatan politik yang

disebut anarki di dunia internasional. Tindakan negara-negara karena itu didorong oleh keinginan untuk *survive* atau mempertahankan diri dari ancaman yang terus-menerus (Anugrah 2019).

Karena setiap negara mengejar keamanan dengan dalam pengertian di atas, bila kita lihat dari kasus negara korea utara, Korea Utara berjuang keras untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat embargo yang dilakukan oleh PBB atas dorongan Amerika Serikat. Kemudian Asumsi realis seperti pada paradigma dalam tulisan ini di analogikan dengan mengatakan bahwa dunia seperti bola biliard dalam gelanggang nya yang saling bertubrukan memang betul adanya. Bola biliard tersebut harus kuat untuk bertahan dari tubrukan-tubrukan yang terjadi. Dan Korea Utara, dengan beragam pendekatan berusaha merestrukturisasi ekonomi dan keamanan yang tampak kacau di awal-awal embargo hingga saat ini.

2.2.3 Denuklirisasi

Denuklirisasi merupakan suatu tindakan pemberhentian pengoprasian penggunaan nuklir oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai suatu perdamaian. Tensi ketegangan antara dua negara tersebut yaitu Amerika Serikat dan juga Korea Utara, menimbulkan respon dari berbagai negara dan juga organisasi global seperti PBB terlibat. Dikarenakan dampak yang akan terjadi sangatlah berpengaruh dan juga dapat menimbulkan ketegangan yang semakin meluas. Denuklirisasi di keluarkan yang dimana suatu negara dapat menganalisa serta menjelaskan perkembangan dalam ketegangan antara kedua negara. Hal tersebut mendapat respon dari Jepang dan juga China.

Dalam hal mengenai bagaimana terciptanya denuklirisasi penulis menambahkan dengan pemaparan penggabungan Neoclassical-Realism merupakan perspektif yang menggabungkan teori realis klasik dan teori neo realis. Dengan

demikian perspektif ini memaparkan bahwa tindakan suatu negara dapat dijelaskan dengan variabel sistemik (penyebaran kekuasaan di beberapa negara), variabel kognitif (persepsi terkait ancaman), dan variabel domestik (lembaga negara atau tokoh masyarakat) yang dapat mempengaruhi kekuasaan. Perspektif ini juga mengakui mengenai Balance of power ala neorealis akan tetapi perspektif ini pun dapat melihat bahwa jika suatu pemimpin negara gagal melakukan penyeimbangan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sistem internasional (Davidson 2008, 76). Maka dari itu hal tersebut dapat juga menjadi acuan bagaimana jika denuklirisasi tidak tercapai dan juga tidak dapat menahan perseteruan antara kedua negara.

2.2.4 Keamanan (Sekuritisasi)

Para aktor sekuritisasi juga dapat menggunakan *speech act* sebagai alat untuk mengontruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan dan untuk meyakinkan dan memberi peringatan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Tindakan tersebut diharapkan dapat menggiring opini public dan memberikan aktor-aktor sekuritisasi kesemoatan untuk memobilisasi kekuasaan negara dalam membentuk peraturan demi menghentikan ancaman yang ada. Penggunaan *speech act* sangatlah penting dalam teori sekuritisasi Copenhagen dan merupakan penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses sekuritisasi (AGUS TRIHARTONO, SUYANI INDRIASTUTI 2020).

Keamanan diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman dan juga didefinisikan sebagai hal yang berfokus pada menciptakan adanya keamanan disekitar wilayahnya. Dimana jika ada aktor yang saling bermusuhan dapat diharapkan terciptanya kebijakan keamanan yang saling tidak agresif. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dan juga Korea Utara sama sama mencari keamanan untuk negaranya masing masing. Dimana Amerika Serikat demi

memproteksi negaranya hingga mengambil langkah politik yang ekstrim, yaitu melarang negara-negara bekerjasama dengan Korea Utara. Serta Korea Utara pun yang menggunakan senjata nuklir untuk memproteksi negaranya dari ancaman.

Menurut Barry Buzan dalam bukunya "*Security A New Framework for Analysis*" menyebutkan bahwa pemerintah dapat mendeklarasikan keadaan darurat yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan segala cara untuk menghentikan perkembangan ancaman tersebut, dan negara berhak untuk menggunakan segala instrumen dan memobilisasi kekuatan hingga menggunakan kekuatan spesial. Atas dasar isu keamanan, pemerintah dapat mengambil langkah politik yang ekstrem, sekalipun itu menyalahi aturan yang berlaku. Studi sekuritisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai; siapa yang men-sekuritisasi, dalam ancaman apa, untuk siapa (objek referensi), dalam kondisi apa, mengapa dan dengan hasil apa

PREMIS MINOR :

Menurut presiden Amerika Serikat Donald Trump, uji coba senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara adalah sebuah ancaman untuk negaranya serta tindakan Korea Utara yang sangat berbahaya dan tidak bersahabat terhadap Amerika Serikat. Seperti yang Donald Trump katakan di akun sosial media Twitter miliknya "Korea Utara telah menjadi ancaman dan hal yang memalukan bagi China" (Kompas.com 2017). Tanggapan tersebut dilakukan akibat uji coba bom hydrogen yang dilakukan Korea Utara pada 3 September 2017.

Serta menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan bahwa peluncuran roket itu mempengaruhi stabilitas keamanan dan keuangan dunia, "Itu bisa melewati Jepang itu betul-betul pasar khawatir dengan risiko geopolitik," ujar Agus.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait suatu masalah yang akan diteliti, yang merupakan penjelasan bersifat sementara yang masih perlu diteliti kembali kebenarannya secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta perumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Karena Amerika Serikat dan PBB menjatuhkan sanksi embargo terhadap Korea Utara, maka Korea Utara terjadi penurunan pendapatan negara”

2.4 Operasional Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Emperik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Karena Amerika Serikat dan PBB menjatuhkan sanksi embargo terhadap Korea Utara	1. Melarang Korea utara mengekspor komoditas hasil tambangnya. Barang-barang Korea Utara yang bakal disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah. Ada pula ikan dan hasil laut.	1. Amerika Serikat (AS), negara pengusul sanksi dalam draf resolusi itu, sebelumnya telah bernegosiasi dengan China sekitar sebulan lalu. Negosiasi dilakukan tak lama setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik antarbenua pada 4 Juli, diikuti percobaan selanjutnya pada 28 Juli

	<p>2. Dilarang tambah pekerja migran karena resolusi ini juga mencegah penambahan jumlah pekerja migran dari Korea Utara di luar negeri. Pekerja migran juga menyumbang pendapatan Korea Utara.</p> <p>3. Pelarangan investasi baru Ada pula pelarangan kerjasama ekonomi (joint venture) dan pelarangan investasi baru terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dikerjasamakan.</p> <p>4. Bank Valuta Asing Korea Utara kena blacklist PBB juga menambahkan sembilan pejabat resmi Korea Utara untuk masuk ke daftar hitam, juga empat entitas dari</p>	<p>https://news.detik.com/internasional/d-3588090/disanksi-pbb-ini-yang-tak-boleh-dilakukan-korea-utara</p> <p>2. "Amerika Serikat berkomitmen untuk mengacaukan jaringan pendanaan rudal balistik Korea Utara dan akan menjatuhkan sanksi bagi entitas dan individu yang membantu atau memberikan dukungan terhadap program rudal balistik Korut," https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200830104901-134-540800/as-ancam-sanksi-negara-dan-entitas-penyedia-misi-rudal-korut.</p>
--	---	---

	<p>Korea Utara ikut di-blacklist.</p> <p>Dari empat entitas itu salah satunya termasuk bank valuta asing Korea Utara.</p>	
<p>Variabel Terikat: Maka Korea Utara terjadi penurunan pendapatan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalami adanya penurunan pendapatan negara 2. Tekstil yang merupakan salah satu ekspor terbesar Korea Utara mengalami pemangkasan sebesar 90% 3. Batu bara yang dijuluki sebagai raja ekonomi Korea Utara karena pendapatan terbesar Korea Utara berasal dari batu bara menjadi anjlok semenjak diberlakukannya sanksi embargo 4. Bank of Korea menyebutkan, produk domestik bruto (PDB) Korea Utara berkontraksi sampai 4,5 persen sepanjang 2020 lalu. Padahal pada 2019, ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat menyepakati sebuah resolusi yang menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara. Ini merupakan paket sanksi ke sembilan yang telah dijatuhkan DK PBB terhadap Korea Utara sejak tahun 2006 terkait program senjata nuklir dan rudal Korea Utara http://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/732 2. Bank of Korea (BOK) atau Bank Sentral Korea Selatan baru saja merilis data mengenai perkembangan ekonomi negara tetangga mereka. BOK

	<p>Korea Utara masih tumbuh positif sebesar 0,4 persen.</p> <p>5. Strategi ekonomi lima tahun terakhir Korea Utara gagal terlaksana hamper diseluruh sector.</p>	<p>menyebutkan bahwa ekonomi Korea Utara mengalami kontraksi terdalam sejak 23 tahun, pada 2020 lalu.</p> <p>https://bigalpha.id/news/krisis-korea-utara-kontraksi-ekonomi-terburuk-dalam-23-tahun</p> <p>3. Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, mengakui bahwa rencana pembangunan ekonomi negaranya gagal di hampir seluruh sector. Pengakuan itu diutarakan Kim saat membuka Kongres Partai Buruh di Pyongyang</p> <p>https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210106125130-113-590137/kim-jong-un-akui-kebijakan-ekonomi-korea-utara-gagal-total</p>
--	--	---

2.5 Skema Kerangka dan Alur Penelitian

Gambar 1

Skema

